

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju inflasi yang rendah dan stabil pasti diinginkan setiap negara. Laju inflasi dapat dikendalikan oleh Bank Sentral dari sisi permintaan agregat dengan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Kebijakan yang dapat memengaruhi permintaan agregat ini tidak hanya dari kebijakan moneter saja, tetapi juga dari kebijakan fiskal atau kebijakan dari pemerintah seperti kebijakan tentang perpajakan dan kebijakan terkait belanja pengeluaran pemerintah. Selain itu, inflasi juga dapat bersumber dari sisi penawaran agregat. Laju inflasi yang berlebihan dapat disebabkan oleh barang dan jasa yang langka ditengah tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tersebut. Ketersediaan barang dan jasa dalam jumlah yang memadai di tempat yang membutuhkan juga merupakan tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi.

Inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil memberi efek yang positif bagi perekonomian. Daya beli yang tidak begitu banyak karena tergerus untuk inflasi membuat konsumen lebih bisa merencanakan uangnya untuk menabung daripada konsumsi. Investasi dapat didorong oleh inflasi yang rendah sehingga kegiatan produksi dapat meningkat dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan naik. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat bahkan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Inflasi yang tinggi juga menjadi permasalahan sosial karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat

yang mempunyai pendapatan rendah karena mereka akan berpikir berulang kali ketika akan menggunakannya untuk konsumsi apalagi untuk menabung. Target untuk menciptakan inflasi yang rendah dan stabil hampir pasti menjadi tujuan dari setiap pemerintah yang berkuasa.

Beberapa periode Indonesia tercatat mengalami inflasi yang tinggi bahkan tergolong dalam hiperinflasi, salah satunya sekitar tahun 1960-an dengan rata-rata inflasi sebesar 294%. Inflasi yang tinggi tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengalami defisit pada anggaran pemerintahan. Hal tersebut mendorong peningkatan jumlah uang beredar yang pada akhirnya menyebabkan laju inflasi terus meningkat. Selain itu perhatian pemerintah juga belum terfokus pada perekonomian sehingga belum banyak investasi berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, terjadi masalah keterbatasan pasokan bahan pangan sedangkan permintaannya tinggi, serta spekulasi yang berlebihan membuat harga-harga barang dan jasa tidak terkendali (Utari, Cristina dan Pambudi 2015).

Tahun 1973-1974 dan 1979-1980 kenaikan minyak dunia membuat penerimaan pemerintah meningkat secara tinggi sehingga meningkatkan jumlah uang beredar yang dapat mendorong terjadinya inflasi meningkat secara tajam. Inflasi di kedua periode tersebut berturut-turut tercatat sebesar 35% dan 20% per tahun. Tahun 1997-1999 terjadi *Shock* eksternal pada krisis keuangan Asia. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 60% saat terjadi krisis pada tahun 1998. Namun saat itu tidak terjadi hiperinflasi karena pemerintah akhirnya melakukan kebijakan stabilitas perekonomian yang di dukung oleh IMF (Utari, Cristina dan Pambudi, 2015).

Undang-undang (UU) No. 4 tahun 2003 yang menerangkan tentang tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa atau kestabilan inflasi. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai dan menjaga inflasi pada tingkat rendah dan stabil agar stabilitas rupiah tetap terjaga. Respon kebijakan moneter ditentukan oleh tingkat inflasi yang ingin dicapai. Selain itu, respon tersebut juga ditentukan oleh perilaku inflasi itu sendiri. Berdasarkan tingkat inflasi yang ingin dicapai kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi rendah pada tingkat yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Pemahaman permasalahan mengenai perilaku inflasi yang diperlukan antara lain terkait dengan persistensi inflasi.

Perilaku inflasi dapat diketahui dari persistensi inflasi itu sendiri. Persistensi inflasi adalah seberapa lama kecepatan yang diperlukan oleh inflasi untuk kembali ke titik semula setelah terjadi guncangan atau *shock*. Guncangan atau *shock* merupakan suatu kondisi yang menyebabkan keadaan ekonomi menjauh dari titik alamiahnya, perhitungan atau pengukuran dari persistensi inflasi diperlukan untuk melihat kecenderungan cepat lambatnya pergerakan inflasi untuk kembali ke nilai normalnya ketika terjadi gejolak atau *shock* (Erviyana, 2016).

Pasca krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 2005 Implementasi *Inflation Targeting Framework* (ITF) menjadi tonggak sejarah perubahan kerangka kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter tersebut mengadopsi kerangka kebijakan moneter yang lebih kredibel, yang mengacu pada penggunaan suku bunga sebagai operasional target dan suatu kebijakan

moneter yang berifat antisipatif. Kebijakan ITF ini menunjukkan tujuan kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga kestabilan inflasi saja. Dengan adanya ITF ini diharapkan dapat mendorong penurunan persistensi inflasi (Arimurti dan Trisnanto, 2011).

Bank Indonesia akan mengumumkan sasaran inflasi yang akan dicapai untuk setiap tahunnya pada kerangka (*Inflation Targeting Framework*) ITF. Setiap periode Bank Indonesia akan mengevaluasi proyeksi inflasi kedepan masih sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan atau tidak. Jika proyeksi inflasi sudah tidak sesuai dengan sasaran, maka Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang telah dimiliki. Misalnya jika proyeksi inflasi melebihi sasaran yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan pada moneter. Tujuannya tidak lain agar inflasi aktual kembali mendekati target inflasi yang sudah ditetapkan.

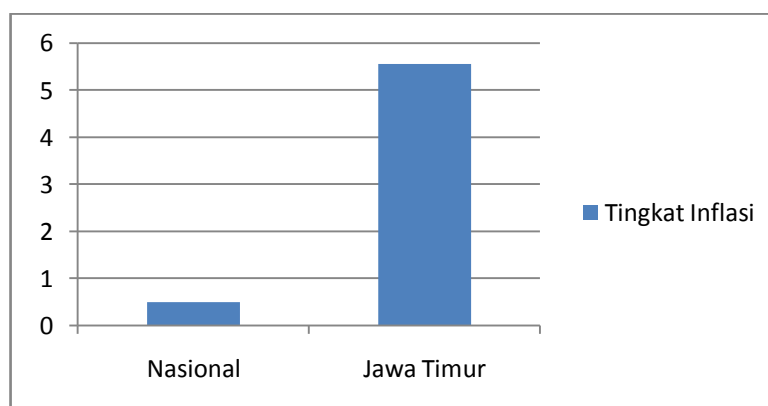
Persistensi inflasi menjadi sangat penting untuk dikaji dalam rangka mendukung perumusan kebijakan moneter yang lebih efektif. Hal ini dilakukan agar efektifitas kebijakan moneter dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif dari inflasi yang tinggi terhadap perekonomian yaitu daya beli masyarakat akan turun dan pelaku dunia usaha akan diliputi ketidakpastian yang tinggi. Tingkat daerah juga akan merasakan dampak dari persistensi tersebut sehingga perlu adanya perhatian pemerintah daerah setempat untuk dapat berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkesinambungan. Di Indonesia perkembangan inflasi nasional tidak terlepas dari perkembangan inflasi yang terjadi di daerah. Oleh karenanya, dirasa perlu untuk mempelajari perilaku inflasi di tingkat daerah, termasuk mengukur dan mencari penyebab serta mengetahui implikasinya terhadap pengendalian inflasi daerah. Hal ini dikarenakan inflasi nasional merupakan hasil penggabungan dari inflasi di daerah dengan bobot masing-masing.

Perbedaan inflasi dari masing-masing daerah mencerminkan adanya karakteristik sumber tekanan harga yang berbeda. Perbedaan karakteristik masing-masing daerah tersebut menjadikan setiap daerah mempunyai tingkat inflasi yang berbeda pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utari, Cristina dan Pambudi (2015) inflasi nasional di 82 kota dengan bobot terbesar berada di Pulau Jawa. Besarnya bobot inflasi dari Pulau Jawa menandakan bahwa daerah di Pulau Jawa mengalami inflasi yang tinggi. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai rata-rata tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Nasional.

Grafik 1.1 Perbandingan Rata-rata Tingkat Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2005 - 2018



Sumber : BPS Jawa Timur

Grafik diatas menggambarkan perbandingan tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan tingkat inflasi Nasional. Data perbandingan tersebut merupakan rata-rata tingkat inflasi bulanan dari januari 2005 hingga september 2018. Jika dilihat dari grafik diatas dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat inflasi di Jawa Timur lebih tinggi daripada tingkat inflasi Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa inflasi Jawa Timur cukup tinggi, bahkan melebihi tingkat inflasi Nasional itu sendiri.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka sangat penting untuk mengetahui pola perilaku inflasi di Jawa Timur, sehingga dapat di ketahui tingkat kecepatan inflasi untuk kembali ke nilai normalnya setelah terjadi gejolak atau *shock*. Hal tersebut guna menjadi referensi dalam perumusan strategi kebijakan pengendalian inflasi khususnya daerah Jawa Timur, serta sebagai alternatif peramalan dalam menetapkan target inflasi. Hal tersebut perlu dipertimbangkan agar inflasi yang telah ditargetkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dapat menyejahterakan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik persistensi inflasi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana karakteristik persistensi inflasi komoditas menurut kelompok pengeluaran di Jawa Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengukur derajat persistensi inflasi dan mengetahui karakteristik inflasi di Jawa Timur.
2. Mengukur derajat persistensi inflasi dan mengetahui karakteristik masing-masing komoditas menurut kelompok pengeluaran di Jawa Timur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang inflasi khususnya tentang presistensi inflasi di Jawa Timur

2. Bagi Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan referensi dalam upaya membahas mengenai presistensi inflasi di Indonesia maupun di daerah-daerah lain

3. Bagi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan pengendalian inflasi dan kebijakan moneter sehubungan dengan fluktuasi yang terjadi pada inflasi Indonesia terutama Jawa Timur